

## PENDIDIKAN POLITIK DI SD MASJID SYUHADA YOGYAKARTA

### *POLITICAL EDUCATION IN SD MASJID SYUHADA YOGYAKARTA*

Oleh: Wilis Putri Hapsari, PGSD FIP UNY, wilishapsari@hotmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik di Sekolah Dasar Masjid Syuhada Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di SD Masjid Syuhada Jalan I Dewa Nyoman Oka Nomor 11 A Yogyakarta dengan subjek penelitian perwakilan siswa kelas I sampai kelas VI, guru kelas III dan kelas IV, serta kepala sekolah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SD Masjid Syuhada menerapkan pendidikan politik di dalam kelas dan di luar kelas. Pendidikan politik di dalam kelas melalui: a) kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran b) kebiasaan-kebiasaan di dalam kelas dan c) peranan guru dalam pembelajaran. Pendidikan politik di luar kelas melalui: a) keadaan multikultural komponen sekolah b) kegiatan pengembangan diri untuk melatih sikap politis siswa.

Kata kunci: pendidikan, politik, sekolah dasar

#### **Abstract**

*This research aims at describing political education in SD Masjid Syuhada Yogyakarta. This qualitative research took place in SD Masjid Syuhada that located on I Dewa Nyoman Oka street number 11 A Yogyakarta and took representative students of grade I up to grade IV, teachers who teach in class III and class IV, and also the head master as the research subject. The data of this research was collected by observation, interview, and study documentation. The data analyzation process was data reduction, data display, and data conclusion. The data was validate by using sources triangulation and techniques triangulation. The result of this researc h shows that SD Masjid Syuhada held political education inside the clasroom and outside the classroom. Political education that hold inside the classroom are: a) curriculum that use in the learning process, b) classroom rituals such, and c) teacher role in the learning process. Political education that hold outside the classroom are: a) multicultural school environment, and b) school development activities to train student's political attitudes.*

*Keywords: political, education, elementary school*

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan investasi utama yang harus di kembangkan seiring dengan pembangunan yang berjalan dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup (Kadir, et al; 2012: 59). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai upaya untuk mewujudkan

cita-cita pendidikan nasional, berbagai elemen pendidikan harus senantiasa mengembangkan kapasitas dan profesionalitasnya sesuai dengan tuntutan zaman.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan (Siswoyo, et al. 2007: 92). Sepanjang rentang kehidupannya, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal manusia selalu mengalami perubahan baik perubahan dalam bentuk fisik ataupun kemampuan mental psikologis (Poerwanti dan Widodo, 2005: 26). Perkembangan manusia dari masa sebelumnya akan selalu berpengaruh terhadap masa sesudahnya. Anak-anak di sekolah dasar rata-rata mempunyai rentang usia dari 7 sampai 13 tahun dimana seseorang di usia tersebut akan mengalami masa

kanak-kanak akhir atau disebut masa bermain (Poerwanti dan Widodo, 2005: 44). Pada masa tersebut manusia akan mengalami belajar yang mencapai kemerdekaan, kebebasan pribadi dan bertanggungjawab.

Peserta didik usia Sekolah Dasar berada dalam tahap pengambilan keputusan diri secara reflektif dari lingkungannya, diperlukan lingkungan yang baik untuk dapat terjadi timbal balik positif dalam diri anak tersebut (Desmita, 2012: 39), pada masa inilah seseorang akan mengalami pembentukan karakter yang mendasar. Sekolah sebagai salah satu bentuk lingkungan yang diprogramkan untuk menjadi wadah dari proses pendidikan memegang peranan penting dalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didiknya. Sekolah dalam memberikan pengalaman belajar tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan sinergisitas dari semua aspek komponen sekolah itu sendiri. Sekolah sebagai bentuk pelaksanaan pendidikan pada suatu masa tidak dapat lepas dari kebijakan politik pemerintah pada saat itu.

Politik menurut Budiarjo (2008: 15) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Salah satu entitas yang sangat erat kaitannya dengan politik adalah negara, dimana akan melibatkan konsep-konsep meliputi kekuasaan, pemerintahan, pengaruh, wewenang, negara, pemerintah, rezim, kebijakan, dan konflik (Darmawan: 2015) yang akan turut andil dalam keterlaksanaan praktek politik dalam suatu negara tidak terkecuali pada sistem pendidikannya.

Kehidupan sekolah sebagai laboratorium manusia saat ini merupakan media utama untuk melaksanakan sosialisasi politik. Sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi politik mempunyai peranan penting untuk mensosialisasikan ideologi dan dasar negara yang dapat disampaikan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas (Darmawan,

*Pendidikan Politik di SD . . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.079* 2015: 109). Sekolah sejalan peranannya sebagai agen sosialisasi politik tentu saja juga melakukan upaya edukasi politik yang disebut dengan pendidikan politik. Pendidikan politik oleh Edgar Fore (Ustman, 2000: 81) didefinisikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Pendidikan politik juga harus dimulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai sistem ketatanegaraan dan peranan seseorang dalam fungsionalis ilmu politik dalam praktek kehidupan. Perkembangan sikap politik di peserta didik sangat ditentukan oleh sekolah tempatnya belajar. Kehidupan peserta didik di tingkat sekolah dasar yang mengalami berbagai dinamika dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya akan membawa pengaruh pada gaya pandang dan presepsinya terhadap sesuatu.

Pada observasi yang dilakukan di lapangan praktek-praktek pendidikan politik seperti tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang selama ini menentukan sikap politik dan presepsi seseorang kurang mendapatkan perhatian di berbagai sekolah- sekolah negeri maupun swasta yang sudah menjadi objek obsevasi peneliti. Asupan pengetahuan siswa mengenai politik hanya ditekankan pada pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan politik, pada kenyataannya anak membutuhkan rasa kemerdekaan, kebebasan pribadi yang kemudian dibingkai dengan rasa tanggung jawab.

Pemaknaan siswa terhadap sistem politik di Indonesia sangat negatif (Rahayuningsih, 2014: Abstrak) menandakan kurangnya pemahaman mengenai politik yang harus diterima oleh siswa. Politik tidak selalu berhubungan mengenai sistem tata kelola pemerintahan yang dimaknai siswa sebagai sesuatu yang kurang baik. Pendidikan seharusnya

menyadarkan hak-hak politik seseorang, ialah untuk menentukan dirinya sendiri, hak untuk memilih, hak-hak untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaannya (Tilaar, 2005: 129). Sekolah melalui sistem otonomi kebijakannya seharusnya mempunyai agenda khusus yang berkaitan dengan pendidikan politik, terutama di sekolah dasar dimana siswa akan mengalami pembentukan karakter dasar. Thomas (2009: 17) mengemukakan bahwa:

*Schools are central settings in children's lives for learning about political power, participation and justice. Even five-year-olds after entering school quickly develop a fairly accurate understanding of the roles of different people in the schools. By the end of their elementary school years they have a very complete understanding of political authority and power.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sekolah adalah lingkungan utama dimana anak dapat belajar mengenai kekuasaan politik, partisipasi, dan keadilan. Anak-anak dalam usia yang muda setelah masuk sekolah akan dapat memahami peranan berbagai orang yang ada dalam sistem sekolah. Pendidikan politik pada masa sekolah akan mengambil peran yang penting dalam menentukan arah pandangan anak-anak untuk menentukan peran-peran yang tepat. Pandangan seseorang pada masa anak-anak tersebut akan mempengaruhi orientasi politik seseorang pada masa yang akan datang.

Pendidikan politik tidak boleh dilupakan dalam pendidikan anak sejak usia sekolah dasar. Pendidikan politik yang ditanamkan secara esensial bukan formalitas dengan memahami materi politik secara holistik dan mendalam akan memberikan bekal kepada diri peserta didik tersebut untuk menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri dalam menyikapi kepentingan dan kebutuhan hidupnya di kemudian hari. Pelaksanaan pendidikan politik yang baik akan membelajarkan anak-anak sejak dini untuk menjadi pemimpin masa depan sebagai bagian dari investasi kemajuan bangsa.

Sekolah dalam melakukan perannya untuk memberikan pengalaman pendidikan politik kepada siswanya dapat melalui berbagai cara. Dewey (Thomas: 2009) menyatakan bahwa menciptakan miniatur aktivitas demokrasi di ruang kelas sekolah umum saat ini masih menjadi hal yang dihindari. Apabila anak-anak diberikan kesempatan untuk mengalami aktivitas demokrasi di kehidupan sehari-harinya seperti sekolah dengan memberikan tanggung jawab, memberikan informasi untuk membentuk prespektif pribadi, dan diberikan kewenangan untuk mengatur efektivitas kelompoknya sendiri seperti kelas, maka mereka akan dapat menjadi kader pelaku demokrasi untuk satu sama lain. Situasi yang seperti ini jarang ditemukan di sekolah-sekolah dasar sekarang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Masjid Syuhada pada tanggal 10 Januari 2017 dan 16 Januari 2017 diperoleh informasi bahwa SD Masjid Syuhada sebagai sekolah swasta tetap memperhatikan aspek pendidikan politik sebagai pengalaman belajar yang wajib diterima pada anak usia sekolah dasar. Selain pendidikan politik yang disampaikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, SD Masjid Syuhada juga menerapkan pendidikan politik melalui tanggung jawab yang diberikan kepada siswa untuk menjadi pengawas sekolah di pagi hari ataupun pada kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa untuk bertanggungjawab dan berperan aktif menentukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan pendidikan politik di SD Masjid Syuhada melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan politik di sekolah, menurunnya jumlah partisipasi politik di masyarakat, dan belum diketahuinya penerapan pendidikan politik di SD Masjid Syuhada. Fokus masalah dari penelitian ini adalah mengenai pendidikan

politik yang dilaksanakan di SD Masjid Syuhada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pendidikan politik di SD Masjid Syuhada.

## **METODE PENELITIAN**

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan *sub-subheading*. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-12 bold, rata kiri. Sebagai contoh dapat dilihat berikut.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di SD Masjid Syuhada yang berlokasi di Jalan I Dewa Nyoman Oka, Nomor 11 A, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai bulan Mei 2017 tahun ajaran 2016/2017.

### **Target/Subjek Penelitian**

Penentuan subjek sebagai sumber data dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive*. Subjek dari penelitian ini adalah enam orang siswa Sekolah Dasar Masjid Syuhada yang merupakan perwakilan dari kelas I sampai dengan kelas VI, dua orang Guru Sekolah Dasar Masjid Syuhada yang terdiri dari satu orang guru kelas III dan satu orang guru kelas IV, dan kepala sekolah.

### **Prosedur**

Prosedur penelitian kualitatif ini dimulai dengan observasi prapenelitian, dilanjutkan dengan pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data di analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas analisis data yang dilakukan meliputi *data*

*Pendidikan Politik di SD . . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.081 reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* yang dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan berulang kali. Data kemudian diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh merupakan deskripsi pendidikan politik yang dilaksanakan di SD Masjid Syuhada baik di dalam ataupun di luar kelas. Data tersebut dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan pedoman wawancara beserta kisi-kisinya, pedoman observasi dan dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan dengan membandingkan data-data yang didapatkan dan mengujikan kesesuaiannya. Analisis yang dilakukan harus berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Analisis data yang dilakukan dengan model Miles dan Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas analisis data yang dilakukan meliputi *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* yang dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan berulang kali.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sekolah Dasar Masjid Syuhada (SDMS) merupakan SD yang terletak di jantung kota Yogyakarta. SDMS beralamatkan di jalan I Dewa Nyoman Oka nomor 11 A, Kota Baru Yogyakarta. Lokasi SD ini terletak tepat di selatan Masjid Syuhada, yang dikelilingi oleh jalan raya. SDMS berdiri pada tanggal 17 Juli 1994 dengan izin pendirian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 50/IZ/KTPS/1995 tertanggal, 25 Juli 1995. Bangunan

SDMS terdiri dari tiga lantai, dengan 24 ruang kelas untuk 4 rombel setiap jenjang kelasnya, ruang guru yang terdapat di setiap lantai, laboratorium IPA, laboratorium agama, ruang musik, dapur, ruang konseling, perpustakaan, ruang *Front Office*, ruang UKS, kantin, pos satpam, lapangan upacara, dan koperasi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak sekolah berpendapat bahwa pendidikan politik memang harus sejak dini diberikan pada anak. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan di SD Masjid Syuhada yang menunjukkan bahwa memang terdapat pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan baik di dalam ataupun di luar kelas. Bentuk-bentuk pendidikan politik yang diterapkan di SD Masjid Syuhada dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik yang dilaksanakan di dalam kelas dan pendidikan politik yang dilaksanakan di luar kelas.

Data penelitian yang didapatkan dari wawancara membuktikan bahwa penerapan pendidikan politik di dalam kelas dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum yang memuat mengenai pendidikan politik. Salah satu pelajaran yang paling terlihat penerapan pendidikan politiknya adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara tersurat memang memuat pendidikan politik. Salah satu bentuk penyaluran pendidikan politik yang disampaikan oleh kurikulum yang diturunkan melalui mata pelajaran adalah dengan menggunakan buku teks. Pendidikan politik di dalam kelas juga dilaksanakan melalui penerapan nilai dan norma yang digunakan di dalam kelas. Penerapan pendidikan politik melalui karakterisasi nilai dan norma tersebut juga terlihat pada perilaku siswa yang teramati oleh peneliti ketika melakukan observasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasa saling berbagi siswa kepada siswa lainnya yang tidak membawa buku, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, penghormatan siswa kepada guru ketika

akan meninggalkan kelas dan masuk lagi ke dalam kelas dengan melakukan izin terlebih dahulu, mengangkat tangan ketika akan berbicara, dan lain-lain. Guru kelas III C memberikan penguatan penerapan nilai dan norma ini bersama dengan ketentuan-ketentuan lain seperti pukul masuk kelas, pakaian seragam, sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya melalui peraturan dan sanksi yang disepakati bersama dengan siswa yang berbentuk peraturan tertulis. Pendidikan politik di dalam kelas juga dilakukan melalui praktek demokratis pembentukan pengurus kelas. Pendidikan politik dalam kelas selain dibelajarkan melalui kepengurusan kelas juga dibelajarkan dengan pembagian tugas piket setiap harinya dan kelompok ketugasan belajar lainnya pada pelajaran-pelajaran tertentu. Salah satu bentuk nyata pendekatan politis siswa terhadap bangsanya adalah dengan mengenal presiden. Siswa usia sekolah dasar sudah mengetahui dan mulai memahami siapa dan apa peranan presiden dalam sistem pemerintahan. Selain data tersebut diungkapkan oleh guru, terdapat pula foto presiden dan wakil presiden, lambang negara, dan atribut kenegaraan lainnya yang dipajang di dalam kelas.

Pendidikan politik yang diberikan oleh guru di kelas tersebut dapat melalui peranan guru di kelas, strategi mengajar guru, cara penanggulangan guru terhadap permasalahan di kelas, cara guru untuk menyiasati perbedaan latar belakang pada siswa, dan pandangan guru terhadap bagaimana pendidikan politik yang sesuai diajarkan untuk anak usia sekolah dasar. Pesebaran latar belakang siswa yang berbeda adalah hal pasti yang terjadi pada setiap kelas, oleh karena itu guru mempunyai peran untuk manajemen kemungkinan perbedaan yang terjadi akibat perbedaan latar belakang tersebut. Perbedaan yang terjadi tidak jarang dapat menjadi penyebab konflik dan kesenjangan sosial di dalam kelas.

Berikut adalah tabel pelaksanaan pendidikan politik di dalam kelas.

Tabel 1. Pendidikan Politik di Dalam Kelas

No.	Bentuk Pelaksanaan	Rincian Pelaksanaan
1.	Pendidikan politik dilaksanakan melalui kurikulum sekolah	Mengarjakan mata Pelajaran yang memuat pendidikan politik misalnya PKn, IPS, dan Bahasa Indonesia
		Menggunakan buku teks pelajaran yang sesuai dengan ketentuan.
		Melaksanakan nilai dan norma yang tercermin dalam pembelajaran
	Melaksanakan kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan yang dilakukan di kelas	Pembentukan pengurus kelas raan Pemasangan atribut kenega Pembentukan kelompok ketugasan belajar ataupun kelompok piket kelas.
Pendidikan politik yang dilakukan melalui peranan guru		Strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran,
		Manajemen kendala belajar siswa dan penanganan masalah yang dilakukan oleh guru
		Manajemen dinamika perbedaan individu di kelas yang dilakukan oleh guru.
		Pandangan guru terhadap Pendidikan politik yang harus diterima oleh siswa.

Pendidikan politik yang diterapkan di kelas oleh SDMS diantaranya adalah proses belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan arahan kurikulum. Kurikulum yang dipakai di SDMS merupakan kurikulum yang diadopsi dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. SDMS saat ini menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran, walaupun pernah untuk menerapkan Kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, SDMS masih menggunkan KTSP, tetapi dalam penerapan pembelajarannya telah mengarah kepada

*Pendidikan Politik di SD . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.083* pendekatan tematik integratif yang ada pada muatan Kurikulum 2013. Baik KTSP maupun Kurikulum 2013 keduanya memiliki muatan politis dalam proses pembelajarannya, pada KTSP muatan pendidikan politik dapat dilihat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, ataupun mata pelajaran lain yang secara tersirat menyimpan muatan tersebut, sedangkan pada Kurikulum 2013 mata pelajaran dikemas secara tematik integratif akan selalu memuat pendidikan politik di setiap pembelajarannya. Kurikulum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang formal dan dalam penentuannya menjadi peranan kebijakan sekolah untuk menggunakannya atau tidak. Dawson, Prewit, dan Dawson (1977:140) mengungkapkan “*The curriculum is potentially one of the major instruments of political socialization.*”. Kurikulum menempati fungsi utama untuk menentukan porsi pendidikan politik yang diterima oleh siswa, melalui kurikulum akan tersaji pemetaan materi dan arahan skenario pembelajaran di dalam kelas, guru yang taat dan tidak banyak melakukan improvisasi pembelajaran akan mengadopsi kurikulum sebagai tungkai kemudi pembelajaran di kelas. Oleh karena itu kurikulum sangat vital perannya untuk memonitor kemampuan politis siswa yang dapat dilihat secara teoritis ataupun praktis.

Penggunaan buku teks yang merupakan bagian dari kurikulum sebagai media penyaluran pendidikan politik diungkapkan oleh Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 144) “*Consciously or not, textbooks and other teaching materials justify and rationalize political practices.*”. Segala bentuk media atau materi yang digunakan dalam pembelajaran dapat menjadi alat untuk menyampaikan pendidikan politik, salah satu contohnya adalah buku teks pelajaran. Materi atau konten-konten yang terdapat dalam buku pelajaran harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan segala jenis proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas tidak dapat terlepas dalam pemberlakuan nilai dan norma yang tercermin pada setiap sikap yang ditunjukkan oleh aktor pembelajaran tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk

pendidikan politik dalam definisi pendidikan politik yang dijelaskan oleh Surbakti (1992: 117) bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai proses dialog antara pendidik, seperti pemerintah, sekolah, partai politik, dan peserta didik, dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik negaranya yang dianggap ideal dan baik. Pendidikan yang mengedepankan nilai dan norma yang baik akan membawa sebuah kedewasaan politis sebagai salah satu bekal untuk menentukan sikap partisipasi yang akan diambil secara bertahap ataupun secara spontan. Pembiasaan pelaksanaan nilai dan norma yang dilakukan secara berulang-ulang akan terinternalisasi ke dalam karakter diri seseorang yang kemudian akan menjadi dasar penentuan sikapnya di masa depan.

Pendidikan politik di dalam kelas juga dilakukan melalui kebiasaan atau ritual-ritual yang ada di kelas. Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 146) menjelaskan bahwa nilai politik ditransferkan melalui kebiasaan yang dilakukan di dalam kelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kebiasaan yang ada di kelas sebagai bentuk pembelajaran politik adalah pembentukan pengurus kelas, pembentukan jadwal piket, dan pemasangan atribut kenegaraan. Di sekolah dasar, anak-anak sudah mulai dikenalkan terhadap kepemimpinan kelas dimana terdapat struktur di dalam kelas yang akan memberikan kewenangan tertentu kepada seseorang yang masuk ke dalam struktur tersebut. Pendidikan politik di kelas juga dapat dilaksanakan melalui pengelompokan ketugasan belajar ataupun kelompok kegiatan dalam kelas lainnya seperti kelompok tugas piket. Hal tersebut juga terjadi di ruang kelas SDMS. Kelompok teman bermain atau *peer group* merupakan salah satu dari agen-agen sosialisasi politik (Darmawan, 2015: 108). Agen-agen sosialisasi politik tersebut adalah peranan yang membantu terbentuknya budaya politik seseorang. Kelompok ketugasan siswa akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab mengenai tugasnya, misalnya dalam piket kelas. Jadwal piket kelas akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok yang bertugas untuk membersihkan kelas, dalam membersihkan kelas siswa akan berlatih untuk berbagai peran dan tanggung jawab dari sini juga siswa akan belajar mengenai kepercayaan dan memahami teman.

Guru menempati peran sentral saat pembelajaran berlangsung, guru dapat melakukan pendidikan politik diantaranya melalui strategi yang digunakan dalam menyampaikan suatu materi pelajaran, manajemen kendala belajar siswa dan penanganan masalah, serta manajemen dinamika perbedaan individu di kelas. Di lingkungan sekolah, anak usia sekolah dasar akan bertemu dengan sosok guru sebagai *role model* utama penentuan sikap, perilaku, dan bahkan dalam hal pandangan politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan bahwa guru memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap orientasi politik peserta didiknya. Guru mempunyai peranan untuk mengendalikan budaya belajar di kelas dengan demokratis ataupun dengan sistem hadiah dan hukuman. Guru kelas tentu saja sudah mempunyai banyak informasi mengenai karakteristik masing-masing siswanya, sehingga tidak jarang guru menggunakan otoritasnya dalam menentukan pembagian kelompok ataupun pemilihan ketua kelas. Sesuai yang diungkapkan oleh Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 149) bahwa "*The teacher have an authority in the classroom and also have a position of general respects and trust in his or her community.*" Guru memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pendidikan politik. Berbagai jenis input yang diterima siswa melalui guru sebagai orang utama penyalur pengetahuan siswa akan berpengaruh terhadap sikap-sikap karakter yang di munculkan siswa sebagai tanda keberhasilan belajarnya. Segala bentuk hal pengajaran yang diterima oleh siswa merupakan rekayasa dari guru. Guru yang terampil dalam menyampaikan pendidikan politik akan membuat siswanya lebih paham mengenai hal-hal politis di sekitarnya. Oleh karena itu kepaahaman siswa, atau tingkat partisipasi siswa terhadap politik sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan politik yang dilakukan oleh guru di kelas. Guru sekolah dasar berperan penting dalam memupuk rasa toleransi

siswa. Lingkungan kelas yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda memerlukan rasa toleransi untuk mencapai situasi kelas yang kondusif dan harmonis.

Peneliti melakukan pengamatan pendidikan politik di luar kelas selama empat belas kali di lingkungan sekolah. Keberadaan pendidikan politik di luar kelas dilakukan melalui dua hal besar, yaitu yang pertama adalah pendidikan siswa di lingkungan sekolah yang multikultural dan yang kedua adalah pengembangan sikap politis siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan lain yang dapat siswa ikuti untuk mengembangkan dirinya. Wawancara peneliti dengan kepala sekolah, guru, dan siswa menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sekolah yang multikultural yang berlangsung dengan harmonis dan perbedaan latar belakang sosial atau budaya tidak bermasalah bagi siswa untuk menentukan teman bermainnya. Siswa kan bermain atau berkelompok berdasarkan kesukaan yang sama. Hal tersebut sejalan dengan data yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi. Peneliti menemukan bahwa terjalin hubungan yang baik antar komponen sekolah, tidak ada diskriminasi di lingkungan sekolah, tidak terdapat kesenjangan sosial yang berarti, dan terbentuknya kelompok siswa berdasarkan kecenderungan kesukaan siswa karena kesamaan hobi ataupun kegiatan

Pendidikan politik diluar kelas juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dapat diikuti oleh siswa. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa SDMS memiliki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa untuk mengembangkan keterampilannya tidak terkecuali untuk mengembangkan jiwa politis siswa. Hal tersebut sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan hasil bahwa SDMS melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswanya baik yang bersifat wajib seperti pramuka untuk semua kelas, PKS untuk kelas IV, Dokter Kecil untuk kelas V, maupun yang

*Pendidikan Politik di SD . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.085* tidak wajib seperti Futsal, Pencak Silat, Musik, Hadroh, MTQ, dan Karate. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler tersebut termasuk sarana pembelajaran politis dengan caranya masing-masing, beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai pengaruh kuat dalam penanaman sikap politis siswa adalah ekstrakurikuler wajib seperti PKS yang membelajarkan keberanian, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan, dan dokter kecil yang membelajarkan tanggung jawab, dan rasa kepekaan sosial. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa setiap siswa di SDMS pasti mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib maupun pilihan.

Organisasi atau kegiatan siswa yang berperan untuk mengembangkan jiwa politik siswa di SDMS selain kegiatan PKS, upacara bendera dan latihan upacara bendera, adalah pemutaran lagu-lagu nasional melalui pengeras suara, kegiatan pembelajaran di luar (*outing class*), sosialisasi informasi melalui mading sekolah, dan koperasi sekolah. SDMS memiliki sistem pengeras suara yang terpasang di berbagai penjuru gedung sekolah, hal ini memungkinkan bagi semua warga sekolah untuk dapat mendengar bunyi-bunyian yang diperdengarkan oleh pengeras suara tersebut.

Peneliti melakukan pengamatan pendidikan politik di luar kelas selama empat belas kali di lingkungan sekolah. Keberadaan pendidikan politik di luar kelas dilakukan melalui dua hal besar, yaitu yang pertama adalah pendidikan siswa di lingkungan sekolah yang multikultural dan yang kedua adalah pengembangan sikap politis siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan lain yang dapat siswa ikuti untuk mengembangkan dirinya. Wawancara peneliti dengan kepala sekolah, guru, dan siswa menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sekolah yang multikultural yang berlangsung dengan harmonis dan perbedaan latar belakang sosial atau budaya tidak bermasalah bagi siswa untuk menentukan teman bermainnya. Siswa kan bermain atau berkelompok berdasarkan kesukaan yang sama. Hal tersebut sejalan

dengan data yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi. Peneliti menemukan bahwa terjalin hubungan yang baik antar komponen sekolah, tidak ada diskriminasi di lingkungan sekolah, tidak terdapat kesenjangan sosial yang berarti, dan terbentuknya kelompok siswa berdasarkan kecenderungan kesukaan siswa karena kesamaan hobi ataupun kegiatan

Pendidikan politik diluar kelas juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dapat diikuti oleh siswa. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa SDMS memiliki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa untuk mengembangkan keterampilannya tidak terkecuali untuk mengembangkan jiwa politis siswa. Hal tersebut sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan hasil bahwa SDMS melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswanya baik yang bersifat wajib seperti pramuka untuk semua kelas, PKS untuk kelas IV, Dokter Kecil untuk kelas V, maupun yang tidak wajib seperti Futsal, Pencak Silat, Musik, Hadroh, MTQ, dan Karate. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler tersebut termasuk sarana pembelajaran politis dengan caranya masing-masing, beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai pengaruh kuat dalam penanaman sikap politis siswa adalah ekstrakurikuler wajib seperti PKS yang membelajarkan keberanian, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan, dan dokter kecil yang membelajarkan tanggung jawab, dan rasa kepekaan sosial. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa setiap siswa di SDMS pasti mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib maupun pilihan.

Organisasi atau kegiatan siswa yang berperan untuk mengembangkan jiwa politik siswa di SDMS selain kegiatan PKS, upacara bendera dan latihan upacara bendera, adalah pemutaran lagu-lagu nasional melalui pengeras suara, kegiatan pembelajaran di luar (*outing class*), sosialisasi informasi melalui mading sekolah, dan koperasi sekolah. SDMS memiliki sistem pengeras suara yang

terpasang di berbagai penjuru gedung sekolah, hal ini memungkinkan bagi semua warga sekolah untuk dapat mendengar bunyi-bunyian yang diperdengarkan oleh pengeras suara tersebut.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pelaksanaan pendidikan politik di luar kelas.

Tabel 2. Pendidikan Politik di Luar Kelas

No.	Bentuk Pelaksanaan	Rincian Pelaksanaan
1.	Keadaan multikultural antar komponen sekolah yang berlangsung kondusif	Hubungan antar komponen sekolah yang terjalin dengan baik Kecenderungan siswa dalam berkelompok tidak mempermasalahkan perbedaan latar belakang.
	Sekolah memiliki kegiatan pengembangan diri untuk melatih sikap politis siswa	Kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib seperti pramuka untuk semua kelas, PKS untuk kelas IV, Dokter Kecil untuk kelas V
		Organisasi/kegiatan, upacara bendera dan latihan upacara bendera, pemutaran lagu-lagu nasional melalui pengeras suara, kegiatan pembelajaran di luar ( <i>outing class</i> ), kegiatan <i>Market Day</i> dan media penyampai informasi seperti mading sekolah dan koperasi sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi multikultural yang ada di SDMS baik dari sisi latar belakang siswa ataupun perbedaan sosial komponen sekolah lain berlangsung kondusif. Kondusivitas tersebut ditunjukkan dengan terjalinnya hubungan antar komponen yang terjalin dengan baik tanpa terdapat

kesenjangan sosial yang berarti. Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 159) mengungkapkan bahwa ketika anak memasuki dunia sekolah, ia akan bertemu dengan berbagai macam keberagaman teman dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan tertentu seperti guru, kepala sekolah, ataupun satpam sekolah. Interaksi yang dilakukan siswa dengan mereka akan membelajarkan siswa untuk memecahkan masalah bersama, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dan berkemungkinan untuk menjalin kerja sama ataupun berkonflik. Hubungan harmonis yang terjalin antar komponen sekolah menunjukkan adanya timbal balik positif antar komponen yang berinteraksi. Sikap saling menghargai dan menjalani aktivitas sesuai dengan perannya masing-masing adalah sebuah hal yang diterapkan untuk mewujudkan keharmonisan tersebut. Siswa yang dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang multikultural akan lebih terlatih dalam toleransi dan pengertian terhadap lingkungan. Lingkungan sekolah yang multikultural merupakan miniatur dari keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu lingkungan multikultural sekolah yang harmonis akan membelajarkan siswa untuk bersikap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan multikultural di tataran kenegaraan di kehidupan selanjutnya. Kecenderungan siswa dalam berkelompok atau memilih teman juga tidak mempermasalahkan latar belakang ataupun perbedaan sosialnya. Siswa akan berkelompok atau berteman dengan teman yang dia sukai dan memiliki kesukaan ataupun aktivitas yang sama. Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 159) mengungkapkan bahwa *“A person’s contacts with other individuals affect his or her way viewing the social and political world.”* Lingkungan multikultural mengajarkan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dengan adil dan baik. Sebuah kecenderungan seseorang untuk membentuk kelompok sosial memang pasti terjadi, tak terkecuali pada anak usia SD. Siswa SD akan lebih senang berkelompok dan bermain dengan teman yang disenanginya atau dengan teman yang memiliki kesukaan yang sama. Hal yang

*Pendidikan Politik di SD . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.087* ditemukan di lapangan oleh penulis adalah bagi anak usia SD perbedaan status sosial tidaklah berpengaruh terhadap kecenderungan pertemanan mereka. Anak SD akan berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial budaya mereka, ketika terdapat konflik mereka mudah sekali untuk berekonsiliasi kemudian kembali bermain bersama. sebuah hal yang diterapkan untuk mewujudkan keharmonisan tersebut. Siswa yang dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang multikultural akan lebih terlatih dalam toleransi dan pengertian terhadap lingkungan. Lingkungan sekolah yang multikultural merupakan miniatur dari keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu lingkungan multikultural sekolah yang harmonis akan membelajarkan siswa untuk bersikap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan multikultural di tataran kenegaraan di kehidupan selanjutnya.

Terdapat banyak pembelajaran luar kelas yang menjadi wadah bagi siswa SDMS untuk pengembangan sikap politisnya. SDMS memiliki kurang lebih 12 kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa baik yang bersifat wajib ataupun yang tidak bersifat wajib. Ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa diantaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk semua kelas, ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) untuk kelas IV, dan kegiatan dokter kecil untuk kelas V. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa diantaranya adalah futsal, pencak silat, karate, musik, hadroh, MTQ, renang, dan tari. Dawson, Prewit, dan Dawson (1977: 161) mengungkapkan bahwa *“The extracurricular activity was given an important position in the philosophy of the democratic school. Participation would give him insight and awareness onto social processes”*. Hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat membelajarkan seseorang mengenai kepekaan sosial, melalui rasa tersebut seseorang dapat membangun jiwa toleransi dan kesalehan sosial

Ekstrakurikuler yang bersifat wajib adalah

ekstrakurikuler PKS untuk kelas IV dan dokter kecil untuk kelas V. Keberadaan ekstrakurikuler PKS berawal dari permasalahan lalu lintas keberangkatan siswa saat pagi hari. Kepala sekolah mempunyai gagasan untuk membelajarkan siswa mengenai keberanian, tanggung jawab dan membantu satpam dalam mengatur lalu lintas keberangkatan di pagi hari. PKS merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas IV, setiap siswa akan mempunyai jadwal jaga setiap satu bulan sekali. Berbeda dengan PKS, dokter kecil sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di kelas V, tidak diikuti oleh semua murid pada jenjang kelas tersebut. Dokter kecil mempunyai mekanisme seleksi yaitu pada awal semester, semua siswa kelas V akan melalui tes dokter kecil dimana siswa yang mempunyai nilai 50% terbaik akan direkrut menjadi dokter kecil yang selanjutnya akan mendapat jadwal jaga pada hari-hari tertentu. Implikasi keberadaan PKS dan dokter kecil sangat bermanfaat terhadap perkembangan belajar siswa. Siswa yang dapat menjalankan tugas dengan baik akan mempunyai rasa kepuasan yang akan membuatnya ingin untuk melakukan lebih baik lagi. PKS akan mengajarkan siswa untuk dapat bertahan dan berani melayani teman dan membantunya menyeberang jalan, tanpa pandang bulu perbedaan terhadap temannya tersebut. Dokter kecil akan mengajarkan siswa mengenai tanggung jawab untuk merawat teman yang sakit. Siswa yang menjadi dokter kecil akan lebih peka terhadap temannya yang sakit daripada siswa yang tidak menjadi dokter kecil, dari sini siswa akan belajar untuk menumbuhkan sifat kesalehan sosial yang kemudian akan memperkokoh bangunan karakternya untuk dapat menentukan

sikap politik pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Salah satu bentuk sosialisasi politik secara langsung Cholisin (2000: 6.7-6.8) adalah *apprenticeship* atau magang untuk aktivitas politik, salah satu kegiatan yang termasuk dalam hal ini adalah Pramuka sebagai aktivitas yang dapat membentuk pribadi. Pramuka merupakan kegiatan kepanduan yang diterapkan dalam satuan pendidikan di semua jenjang di Indonesia. Teknis penerapan dan manajemen kegiatan tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing satuan pendidikan. SDMS mengemas kegiatan Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh seluruh jenjang kelas.

Kegiatan *outing class* akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sosialnya secara lebih intens, karena dalam mengadakan perjalanan bersama akan timbul rasa saling memiliki dan rasa saling menjaga keselamatan satu sama lain. Beberapa siswa yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik akan terlihat menonjol untuk mengatur dan memastikan setiap temannya mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini dapat menjadi sarana atau kesempatan guru untuk mengenal peserta didiknya lebih dalam lagi, sehingga dapat menentukan pemberian perlakuan yang tepat sesuai kebutuhan dan karakter siswanya masing-masing. Begitu juga dengan kegiatan *market day* yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Guru di setiap kelas membagi peserta didiknya menjadi tiga kelompok besar dan memilih seorang ketua kelompok, melalui kelompok ini siswa akan latihan berdemokrasi dalam menentukan masakan atau barang apa yang akan mereka jual saat kegiatan *market day*

berlangsung.

Pendidikan politik di luar kelas selain mengajarkan toleransi dalam lingkungan multikultural ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya, juga dilaksanakan melalui upacara bendera dan pemutaran lagu-lagu kebangsaan melalui pengeras suara sekolah. Upacara merupakan kegiatan yang wajib dilakukan di semua jenjang sekolah, dalam kegiatan ini siswa akan belajar bagaimana cara menghormati bendera merah putih, menghafal pancasila, UUD 1945, dan berbagai atribut upacara lainnya. Pendidikan politik secara eksplisit dapat terlihat dalam proses pelaksanaan upacara. Lagu-lagu kebangsaan yang juga dinyanyikan dalam upacara juga menjadi lagu yang tidak jarang diputarkan oleh pengeras suara sekolah sebagai tanda pergantian mata pelajaran. Lagu-lagu ini walaupun dipandang normal dan lazim diperdengarkan memuat pesan moral sebagai bentuk dan usaha untuk memupuk rasa cinta tanah air yang tidak lain merupakan salah satu proses pendidikan politik. Koperasi sekolah juga hadir sebagai sektor pendukung pendidikan politik. Koperasi sekolah menyediakan berbagai macam buku-buku yang memuat materi dan informasi kenegaraan seperti Undang – Undang Dasar, pengetahuan umum ke Indonesiaan ataupun cerita rakyat tanah air yang semuanya itu akan menambah pengetahuan siswa dan menjadi referensi tambahan bagi siswa untuk menentukan sikap politis pada kesempatan selanjutnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa SD Masjid Syuhada

*Pendidikan Politik di SD . . . (Wilis Putri Hapsari) 1.089* menerapkan pendidikan politik melalui dua proses pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas. Proses pendidikan politik tersebut dijelaskan melalui poin berikut:

### **1. Pendidikan Politik di Dalam Kelas**

Pendidikan politik yang dilakukan di dalam kelas adalah melalui a) kurikulum yang diterapkan yang diturunkan pada pembelajaran mata pelajaran tertentu yang memuat pendidikan politik, penggunaan buku teks pelajaran yang sesuai, dan pelaksanaan nilai dan norma yang tercermin dalam pembelajaran, b) kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di dalam kelas seperti pembentukan struktur pengurus kelas, pembentukan kelompok ketugasan belajar ataupun tugas piket kelas, dan pemasangan atribut kenegaraan contohnya lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, dan slogan kebhinekaan, dan c) peranan guru dalam pembelajaran diantaranya adalah penggunaan strategi strategi dalam pembelajaran, manajemen kendala belajar siswa dan penanganannya, serta manajemen dinamika perbedaan individu di dalam kelas.

### **2. Pendidikan Politik di Luar Kelas**

Pendidikan politik yang dilakukan di luar kelas adalah melalui a) keadaan multikultural antar komponen sekolah yang berlangsung kondusif yang dibuktikan dengan adanya hubungan antar komponen sekolah yang terjalin dengan baik dan kecenderungan siswa dalam berkelompok tidak mempermasalahkan perbedaan latar belakang, b) sekolah memiliki kegiatan pengembangan diri untuk melatih sikap politis siswa oleh sekolah untuk mengembangkan sikap politis siswa diantaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib seperti pramuka untuk semua kelas, PKS untuk kelas IV, Dokter Kecil untuk kelas V, serta organisasi/kegiatan siswa seperti upacara bendera dan latihan upacara bendera, pemutaran lagu-lagu nasional melalui pengeras suara, kegiatan

pembelajaran di luar (*outing class*), kegiatan *Market Day* dan media penyampai informasi seperti mading sekolah dan koperasi sekolah

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Guru lebih meningkatkan kualitas pembelajaran politik kepada siswa sesuai dengan tugas perkembangan siswa.
2. Kepala sekolah hendaknya lebih mengembangkan dan lebih mengawal kebijakan sekolah melalui kebijakan sekolah sebagai upaya memberikan pendidikan politik yang sesuai kepada siswa.
3. Orang tua lebih aktif memberikan dan mengawal pengetahuan siswa dan jiwa politik siswa agar dapat bersikap dengan baik.
4. Sekolah-sekolah lain dapat menjadikan pendidikan politik di SD Masjid Syuhada sebagai inspirasi atau contoh dalam pembuatan kebijakan sebagai upaya pendidikan politik untuk siswa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. (2000). *IKN\_PKN: Diktat Kuliah Jurusan PKN*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PKn dan Hukun FISE UNY
- Desmita. (2012). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Darmawan, I. (2015). *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Dawson, Richard E., Prewit, Kenneth., dan Dawson, Karen S.. (1977). *Political Socialization*. Canada: Little Brown and Company (Inc.)

Kadir, Abdul., et al. (2012). *Dasar-dasar pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poerwanti, E. & Widodo, N., (2005). *Perkembangan Peserta Didik*. Malang: UMM Press.

Siswoyo, D., et al. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Thomas, Nigel. (2009). *Children, Politics, and Communication; Participation the Margin*. Great Britain: The Policy Press University of Bristol.

Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Kompas.